

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam penelitian ini, digunakan teori agensi sebagai kerangka teoritis. Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (pihak yang memberikan wewenang) dan *agent* (pihak yang menerima wewenang) dalam suatu bentuk kerjasama yang disebut sebagai "*nexus of contract*". Menurut Jensen & Meckling (1976), keagenan mengacu pada perjanjian antara *principal* dan *agent*, di mana *agent* diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam konteks organisasi publik, permasalahan keagenan terjadi antara pemerintah sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal* yang menyerahkan wewenang kepada pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Teori agensi menjadi landasan pemahaman organisasi sektor publik, mengakui adanya hubungan dan permasalahan agensi dalam pemerintah daerah (Halim & Abdullah, 2006).

Perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) merupakan dampak negatif yang dapat muncul dari teori keagenan. Hal ini terkait dengan asimetri informasi di mana *agent* memiliki lebih banyak informasi tentang keuangan dibandingkan dengan *principal*. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, terkadang pihak *principal* menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi (*self-interest*) (Abdullah & Asmara, 2006). Konflik kepentingan (*conflict of interest*) juga muncul dalam teori agensi sebagai sebuah representasi di mana baik *principal* maupun *agent* memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan masing-masing (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja dapat diartikan sebagai hasil atau luaran yang telah atau akan dicapai dalam program/kegiatan yang terkait dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja dapat diinterpretasikan sebagai

pencapaian yang telah direncanakan oleh individu atau organisasi tertentu. Selain itu, menurut peraturan tersebut, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat diukur dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dimiliki daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah (Halim, 2012). Kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi mematuhi peraturan dan ketentuan terkait pengelolaan keuangan secara baik dan benar (Indah & Tyas, 2020).

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tiga tujuan, yaitu: meningkatkan kinerja pemerintah, membantu alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Mahmudi (2007) mengidentifikasi beberapa tujuan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat beberapa manfaat dalam penyusunan pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f. Membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur melalui analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2019:85), analisis laporan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan memberikan makna tertentu yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2019:140). Menurut Mahmudi (2019), rasio kemandirian dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan dengan karakteristik pemerintah daerah, dan rasio kemandirian menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan

pemerintah daerah, terutama dalam menilai tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada tahun 2021 yang tergolong rendah.

Berikut adalah kriteria kategori tingkat kemandirian dan kemampuan daerah, seperti yang tercantum dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Kinerja Keuangan	Persentase Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 dalam (Tifani *et al*, 2023)

2.1.3 Kemakmuran Pemerintah Daerah

Menurut Masdiantini & Erawati (2016), kemakmuran dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam konteks pemerintah daerah, kemakmuran dapat diamati dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Besarnya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. PAD sendiri merupakan sumber pendapatan sebenarnya dari suatu daerah, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai pembangunan dan kegiatan usaha daerah, serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Pengukuran kemakmuran dapat dilakukan dengan mengukur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan proksi dari kemakmuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan PAD sebagai sumber utama pendanaan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada

dana dari pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingginya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya secara optimal untuk menggali sumber-sumber pendapatan, yang juga menandakan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki PAD rendah. Beberapa penelitian, seperti penelitian oleh Marhawai (2015) dan Iswantini *et al* (2020), mendukung pengaruh positif kemakmuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan secara parsial. Namun, penelitian Andani *et al* (2019) menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kemakmuran pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan dalam (Aulia & Rahmawaty, 2020):

$$\text{Kemakmuran} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat tercermin dari besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016), aset tersebut dapat digunakan sebagai indikator ukuran pemerintah daerah. Menurut Renas & Muid (2014), semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin mudah kegiatan operasional dilakukan dan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat memiliki dampak positif terhadap kegiatan operasional pemerintah daerah dan meningkatkan performa keuangan pemerintah daerah (Kusumawardani, 2012). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menghitung total aset dalam periode waktu tertentu yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan bagian neraca. Total aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, deposito, aset tetap, dan dana cadangan.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan hal ini, seperti penelitian oleh Alvini (2018) dan Tama & Adi (2018), menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan total aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa total aset mempengaruhi ukuran pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin lancar pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga pelayanan publik dapat lebih mudah terpenuhi. Kegiatan operasional yang berjalan dengan baik juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berkontribusi dalam memajukan daerah melalui peningkatan kinerja. Dalam konteks ini, semakin besar total aset, semakin besar ukuran pemerintah daerah, dan hal ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin kecil total aset, semakin kecil ukuran pemerintah daerah, dan hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan dalam (Aulia & Rahmawaty, 2020):

Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset Daerah
--

2.1.5 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diketahui dari jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Halim, 2012).

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada daerah memiliki risiko terkait dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana bantuan kepada daerah yang kemudian akan dapat digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau untuk kepentingan lainnya. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat perlu

diminimalisir karena jika pemerintah daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat, hal tersebut dapat berdampak negatif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, semakin berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Kusuma & Handayani, 2017).

Dalam penelitian ini, digunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan, yang diukur menggunakan proksi yang sama seperti dalam penelitian Aulia & Rahmawaty (2020) dan Setiani & Ismunawan (2022). Pengukuran ini dipilih karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan dalam (Aulia & Rahmawaty, 2020):

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang terkait dengan pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Menurut Halim (2014) belanja modal merupakan salah satu jenis belanja daerah yang memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena kegiatan belanja modal dianggap dapat memberikan efek *multiplier/* pengganda bagi perekonomian masyarakat melalui pembangunan jalan, jembatan, pabrik, dan sebagainya.

Menurut Antari & Sedana (2018), belanja modal merupakan jenis belanja pemerintah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Belanja modal juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kalangan bawah. Tingginya belanja modal juga dapat menyebabkan peningkatan produktivitas perekonomian, yang dalam hal ini mencerminkan kinerja

pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014). Meskipun belanja modal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tetap perlu mengendalikan dan menyesuaikan belanja daerah agar tidak melebihi pendapatan yang dimiliki. Jika suatu daerah memiliki entitas belanja modal per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya, maka daerah tersebut harus melakukan pengendalian dalam pengelolaan keuangannya (Brusca *et al*, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astiti & Mimba (2016), Mulyani & Wibowo (2017), Alvini (2018), Kirana, A. S., & Sulardi, S. (2020). Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) dan Maulina *et al* (2021) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja modal dapat dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan dalam (Mulyani & Wibowo, 2017):

<p style="text-align: center;">Belanja Modal</p> <p style="text-align: center;">= Realisasi Belanja Modal (Belanja Tanah + Peralatan dan Mesin + Gedung dan Bangunan + Jalan, Irigasi dan Jaringan + Aset tetap lainnya + Aset Lainnya)</p>
--

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi referensi penting bagi penulis dalam menjalankan penelitiannya, dengan tujuan untuk memperkaya teori, ide, dan pengetahuan yang digunakan dalam pengkajian penelitian tersebut. Berikut ini adalah ringkasan beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Indah Setiani, Ismunawan (2022)	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Pengangguran 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah dan Belanja Modal Daerah Objek Penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Pengangguran mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan 2. Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan 3. Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4. Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan
2.	Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Objek Penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat daerah 3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat
3.	Parassela Pangestu Primadiva, Dini Rosdini, Sri Mulyani (2021)	Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Tingkat Kekayaan 2. Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal Objek Penelitian oleh peneliti	1. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah 2. Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	
4.	Rahmawan, Fauzan (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Ukuran Pemerintah Daerah <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p>	<p>Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Belanja Modal</p> <p>Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 3. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Dwi Agustina Iswantini, Agung Hirmantono, dan Rita Natalia (2020)	Pajak Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Lamongan)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Intergovernmental Revenue 3. Kemakmuran <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Kemakmuran Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p>	<p>Variabel Independen yang berbeda: Ukuran Pemerintah, Tingkat Ketergantungan, dan Belanja Modal</p> <p>Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 2. Intergovernmental Revenue secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kemakmuran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
						terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
6.	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran (2013-2018)	Variabel Independen: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Dana Keistimewaan 4. Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018 2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018 3. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018 4. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018
7.	Rafika Aulia, Rahmawaty (2020)	Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan	Variabel Independen: 1. Kemakmuran Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen:	Variabel Independen yang berbeda: Belanja Modal	1. Kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	2. Ukuran Pemerintah Daerah 3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	pemerintah daerah di Provinsi Aceh 2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh 3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Aceh
8.	Mega Andani, Sarwani, Novita Weningtyas Respati (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia	Variabel Independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Kemakmuran Daerah 3. Belanja Modal 4. Opini Audit Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Daerah, Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia 2. Kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Indonesia 3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Indonesia 4. Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Indonesia
9.	Ni Made Diah Permata Sari, Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah dan Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bandung 3. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung

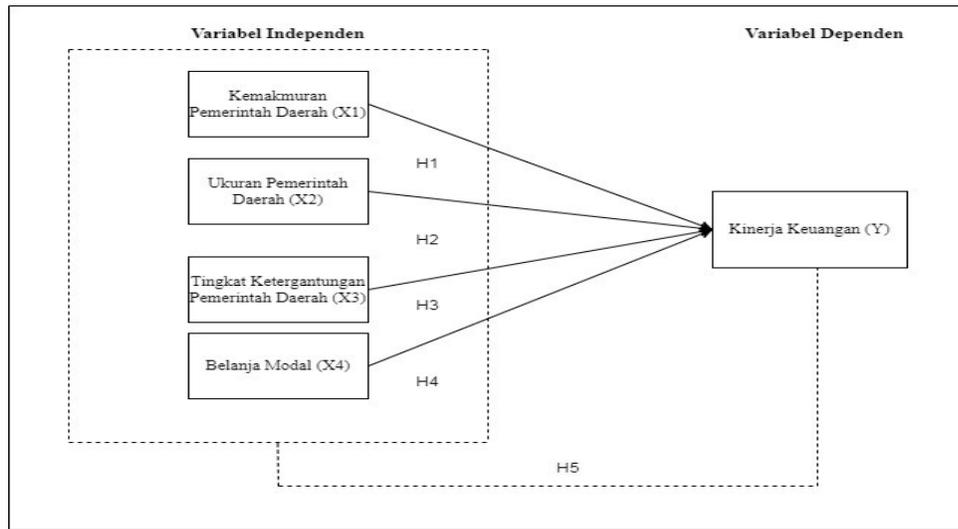
No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
10.	Fassa, M. N., & Trisnawati, R (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Tengah) Tahun 2014-2017	Variabel Independen: 1. Ukuran Daerah 2. Kemakmuran (wealth) 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat 4. Leverage 5. Belanja Daerah Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan: Meneliti menggunakan variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Variabel Independen yang berbeda: Belanja Modal Objek Penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1. Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Kemakmuran dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: data diolah (2023)

Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan oleh penulis. Terdapat kesamaan dalam penggunaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal. Namun, terdapat perbedaan pada populasi dan sampel yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis melaksanakan penelitian ini pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2022:60), kerangka berpikir merupakan hasil integrasi atau sintesis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan objek penelitian dengan tepat dan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dalam kerangka konseptual. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditemukan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Menunjukkan secara parsial
 - - - - - → : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran yang disajikan di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh tersebut dapat terjadi baik secara parsial, di mana setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara terpisah, maupun secara simultan, di mana pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2022:63) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan bersifat sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, namun belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu apakah variabel Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran pemerintah daerah dapat diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 23 Tahun 2014, PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pengenaan pajak dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. PAD berperan penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan kegiatan ekonomi lokal di daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana yang diberikan pemerintah pusat. Pertumbuhan PAD juga dapat menjadi faktor penopang kinerja ekonomi makro, karena pertumbuhan yang positif dapat mendorong investasi dan perbaikan infrastruktur di daerah tersebut. Infrastruktur yang baik dan tingginya tingkat investasi di suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah tersebut. Selain itu, kualitas layanan publik yang baik juga diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah.

Uraian di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Rahmawaty (2020), dimana mereka menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kemakmuran dan kinerja. Begitu pula, penelitian Iswantini *et al* (2020) juga menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Millenia (2022), yang menyatakan bahwa kemakmuran berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga ada pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang memiliki skala yang besar dihadapkan pada tekanan yang tinggi untuk mengungkapkan kinerja keuangannya kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan skala yang besar diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang skalanya lebih kecil. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019), Putri & Amanah (2020), dan Maulina *et al* (2021) menggunakan total aset sebagai proksi untuk ukuran pemerintah daerah.

Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam operasional dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kemudahan operasional juga dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuktikan peningkatan kinerja untuk kemajuan daerah (Kusumawardani, 2012). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Maiyora *et al* (2015) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan aset yang besar diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang ukurannya lebih kecil.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji ukuran pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Nurhayati & Hamzah (2020) dan Kirana & Sulardi (2020), menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penemuan Kirana & Sulardi (2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula tuntutan untuk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Diduga ada pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pendapatan dari sumber eksternal yang dikenal sebagai dana perimbangan. Tujuan dari dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Penggunaan dana perimbangan ini akan diawasi oleh pemerintah pusat dan semakin besar jumlahnya, semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya, karena sumber pendapatan mereka berasal dari pihak eksternal. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah akan menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan program-program kerjanya (Dasmal *et al*, 2020).

Uraian di atas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Rahayu (2019), Primadiva *et al* (2021), dan Setiani & Ismunawan (2022), yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga ada pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap di daerah. Abba *et al* (2015) dan Intani & Waluyo (2018) juga berpendapat bahwa belanja modal merupakan salah satu jenis

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan nilai aset tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu contoh dari kegiatan belanja modal adalah pembangunan infrastruktur fasilitas umum, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan berdampak positif pada perkembangan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Halim (2014:228) yang menyatakan bahwa kegiatan belanja modal oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan efek *multiplier* bagi perekonomian di daerah tersebut.

Andirfa *et al* (2016), Sari & Mustanda (2019), serta Simamora & Budiwitjaksono (2022) juga menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Diduga ada pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.5 Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk menentukan apakah variabel Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kemakmuran Pemerintah Daerah diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan, Ukuran Pemerintah Daerah diukur menggunakan total aset, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah diukur dengan membandingkan dana perimbangan dengan total pendapatan, sedangkan Belanja Modal diukur menggunakan total realisasi belanja modal yang mencakup Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Millenia (2022), Kirana, A. S., & Sulardi, S. (2020), Primadiva *et al* (2021), dan Simamora & Budiwitjaksono (2022) mendukung kesimpulan bahwa secara bersama-sama, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H_s: Diduga ada pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.